

LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI

Tahun Sidang	: 2014-2015
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: 25
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Dalam Negeri, Kepala BNPP, Ketua KPU, Ketua Bawaslu
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 2 Februari 2015
Waktu	: Pukul 19.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: 1. Pembicaraan awal pembahasan APBN-P 2015 2. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014
Ketua Rapat	: Dr. Wahidin Halim, M.Si /Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Minarni, SH/KabagSet Komisi II DPR RI
Hadir	: 38 Anggota Komisi II DPR RI

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi II DPR RI pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015 dibuka pada pukul 19.30 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Bapak **Dr. Wahidin Halim, M.Si** dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan agenda acara pada hari ini yakni terkait dengan Rencana strategis Kementerian Sekretariat Negara RI dalam susunan "Kabinet Kerja" 2014-2019; Pembicaraan awal Pembahasan APBN-P 2015; Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014.
3. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Menteri Dalam Negeri, Kepala BNPP, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu untuk memberikan pemaparannya.
4. Menteri Dalam Negeri memberikan pemaparan sebagai berikut:
 - a. Usulan penyesuaian nomenklatur program:
 - 1) Dukungan manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Dalam Negeri yang bertanggungjawab SETJEN;
 - 2) Pengawasan internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab ITJEN;
 - 3) Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan umum yang bertanggungjawab DITJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM;
 - 4) Bina Administrasi Kewilayahan yang bertanggungjawab DITJEN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN;
 - 5) Bina Otonomi Daerah yang bertanggungjawab DITJEN OTONOMI DAERAH ;
 - 6) Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggungjawab DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
 - 7) Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH;
 - 8) Bina Pembangunan Daerah yang bertanggungjawab DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH;

- 9) Bina Pemerintahan Desa yang bertanggungjawab DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA;
 - 10) Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang bertanggungjawab BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA;
 - 11) Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri yang bertanggungjawab BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN;
 - 12) Pendidikan Kepamongprajaan yang bertanggungjawab IPDN.
- b. Sasaran Program dan Anggaran Kemendagri:
- 1) Meningkatnya kualitas dan terimplementasikannya secara optimal perencanaan, agenda strategis, program legislasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN, sarana dan prasarana kerja, serta terselenggaranya Reformasi Birokrasi lingkup Kemendagri.
 - 2) Meningkatnya ketahanan dan kewaspadaan ideologi, wawasan kebangsaan, ekonomi dan sosial budaya
 - 3) Meningkatnya konsolidasi dan koordinasi kebijakan penguatan peran gubernur, pelayanan publik dan kerjasama daerah, serta penataan wilayah administrasi dan kawasan (kawasan khusus dan kawasan perkotaan), dan batas antar Negara
 - 4) Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - 5) Terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan penerapan SPM, serta sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah sebagai bagian integral pembangunan nasional
 - 6) Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa/kelurahan dalam menciptakan pemerintahan desa yang efektif, akuntabel, demokratis dan partisipatif
 - 7) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif
 - 8) Meningkatnya Kualitas Database Kependudukan Nasional sebagai dasar Penerbitan Dokumen Kependudukan dan pelayanan publik, serta mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada dan kepentingan pembangunan nasional
 - 9) Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan atas pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan Daerah
 - 10) Meningkatnya kualitas hasil kebijakan kelitbangan Kemendagri sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan serta terwujudnya inovasi oleh Pemerintah Daerah
 - 11) Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam rangka efektifitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah
 - 12) Meningkatnya kualitas pendidikan kepamongprajaan dan meningkatnya kepuasan Stakeholder terhadap Etos Kerja alumni IPDN, serta meningkatnya hasil penelitian dan pengabdian masyarakat
- c. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014, Kementerian Dalam Negeri mendapat alokasi anggaran sebesar Rp14.903.061263.000.- dalam pelaksanaannya sepanjang tahun 2014 terdapat beberapa penyesuaian baik pengurangan maupun penambahan, diantaranya adanya kebijakan penghematan, penambahan tunjangan kinerja, lunturnya PNPM-MPD, penambahan pagu PNBP, Optimalisasi Ditjen Dukcapil, sehingga total alokasi anggaran Kemendagri TA 2014 menjadi sebesar Rp14.069.195.129.000.-.

Berdasarkan data pada Sistem Akuntansi Umum (SAU), realisasi keuangan Kementerian Dalam Negeri sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp12.762.914.918.178.- atau 90,72% dari total pagu anggaran sebesar Rp14.069.195.129.000.-.

5. Kepala BNPP memberikan pemaparan antara lain:

a. Pelaksanaan DIPA BNP TA 2014

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 258/KMK.02/2013 tentang Penetapan Pagu Anggaran Kerje Anggaran Kementerian/LPNK (RKA K/L) TA 2014 bahwa untuk TA 2014 BNPP mendapat pagu anggaran APBN sebesar Rp194.095.304.000.- dan sesuai dengan kebijakan Pemerintah dalam tahun 2014, anggaran tersebut mendapat pemotongan/penghematan dalam efisiensi sebesar Rp39.768.686.362.-sehingga anggaran BNPP TA 2014 menjadi Rp154.617.626.368.-

Adapun pemotongan/penghematan anggaran tersebut terdiri atas **Penghematan anggaran Kementerian /LPNK** TA 2014 sebesar Rp25.176.422.000.- **Penghematan perjalanan Dinas dan Meeting/konsinyering** sebesar Rp8.067.000.000.- dan tentang **pembatasan kegiatan Pertemuan/Rapat diluar Kantor/Hotel** sebesar Rp6.234.255.632.-

Pagu anggaran BNPP TA 2014 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan 2 (dua) program, yakni: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP sebesar Rp61.628.060.762.- dengan penggunaan pada Satker Pusat dan pada Satker Dekonsentrasi/Dekon (13 Provinsi Kawasan Perbatasan) yang kedua dalah program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebesar Rp92.989.565.606.- dengan penggunaan pada Satker Pusat dan penggunaan pada Satker Tugas Pembantuan (10 Kabupaten/Kota Kawasan Perbatasan).

b. Dana Alokasi Khusus Sarana Prasarana Kawasan Perbatasan (DAK-SPKP) TA 2014.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/PMK.07/2013 tentangn Pedoman Umum danAlokasi Khusus Tahun Anggaran 2014, bahwa alokasi anggaran APBN untukDana Alokasi Khusus Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan /DAK SPKP TA 2014 adalah sebesar Rp493.070.000.000.-

c. Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Kementerian/LPNK dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Pembangunan Kawasan Perbatasan TA 2014 (Evaluasi Rencana Aksi K/L TA 2014)

Salah satu tugas pokok BNPP adalah melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan negara yang dilaksanakan oleh Kementerian/LPNK.

6. Ketua KPU memberikan pemaparan terkait dengan:

a. Pembicaraan Awal Pembahasan APBN-P 2015

- 1) Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2015 KPU sesuai Surat Menkeu Nomor S-642/MK.02/2014 tangaal 24 September 2014, bahwa Pagu Alokasi Anggaran KPU sebesar Rp. 1.134.229.919.00,-
- 2) Usulan Tambahan Anggaran Tahun 2015 sebagai inisiatif baru sesuai Surat Nomor 08/KPU/II/2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang Usulan Tambahan Anggaran untuk Bagian Anggaran 076 KPU TA 2015 sebesar Rp.1.176.436.332.000.

- b. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2014
 - 1) KPU telah selesai menyelesaikan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan aman dan sukses.
 - 2) Tahun 2014 KPU memperoleh anggaran sebesar RP.13.880.947.578.000, dan terealisasi sebesar 79,33%, dan penyebab rendahnya realisasi tersebut dikarenakan adanya surat Edaran Menpan dan RB Nomor 11 tahun 2014 tentang pembatasan kegiatan pertemuan/rapat diluar kantor, terdapat efisiensi dalam pengadaan dan distribusi logistic Pemilu 2014 serta tidak adanya Pemilu Presiden dan Wapres Putaran ke-2.
7. Ketua BAWASLU memberikan pemaparan diantaranya:
 - a. Pembicaraan Awal Pembahasan APBN-P 2015
 - 1) Berdasarkan surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran (SP-DIPA) induk tahun anggaran 2015 Nomor 115.01-0/2015 tanggal 14 November 2014 Bawaslu memperoleh alokasi PAGU sebesar Rp456.972.651.000.-
 - 2) Usulan Tambahan Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp137.240.000.000,-
 - b. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2014

Tahun 2014 Bawaslu memperoleh anggaran sebesar RP3.759.496.500.000,- dan terealisasi sebesar 86,60%, dan penyebab rendahnya realisasi tersebut dikarenakan adanya karena keterbatasan SDM, pengelola keuangan daerah baik dari segi jumlah maupun kapasitas hal ini terjadi pada Bawaslu RI, Satker Bawaslu Provinsi maupun Panwaslu Kabupaten/Kota

Adapun rincian yang mempengaruhi realisasi pelaksanaan anggaran TA 2014 sebagai berikut:

 - 1) Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berlangsung dalam satu putaran;
 - 2) Kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang penghematan perjalanan dinas dan kebijakan larangan menggunakan hotel dalam melaksanakan kegiatan;
 - 3) Pengurangan masa kerja Panwascam dan PPL yang semula 9 bulan menjadi 8 bulan karena penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berlangsung satu putaran;
 - 4) Keterbatasan SDM pengelolaan keuangan baik di Satker Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Pusat, khususnya pengelolaan keuangan;
 - 5) Kelembagaan Pengawas Pemilu Kabupaten/kota masih bersifat *ad hoc*, sehingga kesulitan dalam pelaksanaan anggaran.

II. KESIMPULAN

1. Komisi II DPR RI dapat menerima laporan realisasi pelaksanaan APBN Tahun 2014 dengan tingkat penyerapan masing-masing adalah:
 - a. Kemendagri (tingkat penyerapan sebesar 90,72%);
 - b. BNPP (tingkat penyerapan sebesar 83,3%);
 - c. KPU RI (tingkat penyerapan sebesar 79,33%); dan
 - d. BAWASLU RI (tingkat penyerapan sebesar 86,60%).

Namun demikian, Komisi II DPR RI meminta agar tingkat penyerapan anggaran pada Tahun Anggaran 2015 dapat lebih dioptimalkan.

2. Terhadap anggaran Kementerian Dalam Negeri, BNPP, KPU RI, dan BAWASLU RI pada RAPBN Perubahan 2015, Komisi II DPR RI akan membahasnya secara lebih mendalam pada RDP yang akan datang. Komisi II DPR RI meminta agar dilakukan koordinasi antar kementerian/LPNK agar terjadi keterpaduan program/tidak tumpang tindih anggaran.
3. Terhadap usulan tambahan anggaran:
 - a. Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp1.000.000.000.000,-
 - b. KPU RI sebesar Rp1.176.436.332.000,-
 - c. BAWASLU RI sebesar Rp137.240.000.000,-Komisi II DPR RI dapat memahaminya dan akan membahasnya lebih lanjut dalam RDP yang akan datang.
4. Terhadap permintaan Kementerian Dalam Negeri agar anggaran pada Direktorat Jenderal PMD sebesar Rp3.532.486.346.000.- dapat dipertahankan alokasinya untuk mendukung pembiayaan pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015, Komisi II DPR RI dapat memahaminya dan akan membahasnya lebih lanjut pada RDP yang akan datang.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 22.45 WIB.

JAKARTA, 2 FEBRUARI 2015
KETUA KOMISI II DPR RI

ttd

Dr. WAHIDIN HALIM, M. Si
A-440